

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Ali. A. (2002). *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*. Jakarta The World Bank.
- Anshary. MK. (2010). *Hukum Perkawinan Di Indonesia : Masalah-Masalah Krusial (1 Ed.)*. Pustaka Pelajar.
- Anshary. MK, (2015). *Hukum Perkawinan Di Indonesia - Masalah-Masalah Krusial (2 Ed.)*. Pustaka Pelajar.
- B. Sunggono. (2017). *Metodologi Penelitian Hukum (16 Ed.)*.
- C. S. T. Kansil. (2009). *Kamus Istilah Aneka Hukum*. Jala Permata.
- Sirman. D. (2017). *Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Teori Dan Praktiknya Di Indonesia (2 Ed.)*. CV Mandar Maju.
- Ahmad. K. (2003). *HAM Dalam Perspektif Islam :Menyikapi Persamaan Dan Perbedaan Antara Islam Dan Barat*. Jakarta Salemba Diniyah.
- EOH, O. (2001). *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori Dan Praktek (1 Ed.)*. Pt.Raja Grafindo.
- H. R. Soemitro. (1990). *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri (4 Ed.)*. Ghalia Indonesia.
- Hazairin. (1981). *Demokrasi Pancasila*. Bina Aksara.

- I Ketut Artadi, S. (2007). *Hukum Adat Bali, Dengan Aneka Masalahnya* (4 Ed.). Pustaka Bali Post.
- Imam. G & A. Ma'ruf A. (2004). *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Mukhtamar, Munas, Dan Konbes Nahdlatul Ulama*. Diantama.
- Mardani. (2011). *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern* (1 Ed.). Graha Ilmu.
- Daud. A. (1994). *Peraturan Perkawinan Indonesia Dan Kedudukan Wanita Di Dalamnya*. Dalam *Mimbar Hukum* No.15 Thn.V (1 Ed.). Raja Grafindo Persada.
- Kusumaatmadja, M. (2002). *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan : Kumpulan Karya Tulis / Mochtar Kusumaatmadja ; Editor, H.R. Otje Salman, Eddy Damian* (E. D. H.R.Otje Salman (Ed.); 1 Ed.). Alumni.
- Nyoman A. (1998). *Petunjuk Teknis Perkawinan Hindu*. Paramita.
- Hadikusuma, H. (2003). *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama* (2 Ed.). Mandar Maju.
- Soedharyo S. (2004). *Hukum Orang Dan Keluarga : Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, Dan Hukum Adat* (2 Ed.). Sinar Grafika.
- Soekanto, S. & S. Mamudji. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (17 Ed.). Rajawali Pers.
- Sumiyati. (1982). *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang - Undang*

Perkawinan (1 Ed.). Yogyakarta Liberty.

Wahyuni, S. (2011). Kontroversi Perkawinan Beda Agama. *Kajian Hukum Islam Dan Sosial Kemasyarakatan*, 11(2), 14–34.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksana Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Peraturan Presiden No.96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden No.96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019;

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2023;
 Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986;
 Putusan Pengadilan Negeri Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby;
 Putusan Pengadilan Negeri Nomor 423/Pdt.P/2023/PN.Jkt Ut;
 Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4/MUNAS/VII/MUI/8/2005 tentang
 Perkawinan Beda Agama.

C. Sumber Lain

(Kbbi), K. B. B. I. (N.D.). Arti Kata Legalitas. Badan Pengembangan Dan
 Pembinaan Bahasa (Pusat Bahasa). Diambil 23 Maret 2023, Dari
[Https://Kbbi.Web.Id/Legalitas](https://kbbi.web.id/legalitas)

Abba Gabrillin. (2015, Juni 19). Majelis Tinggi Konghucu: Perbedaan Agama
 Tak Jadi Penghalang Perkawinan. Kompas Indonesia.
[Https://Www.Mkri.Id/Index.Php?Page=Web.Berita&Id=11155#:~:Text=Meskipun Demikian%2c Uung Mengatakan%2c Li,Indonesia Serta
 Hukum Perkawinan Matakini.](https://www.mkri.id/index.php?page=web.berita&id=11155#:~:text=meskipun demikian%2c uung mengatakan%2c li,indonesia serta hukum perkawinan matakini.)

Anwar Hakim, R. S. (2022). Analisis Putusan MA Perkara No.
 916/Pdt.P/2022/PN.Sby Dalam Mengabulkan Permohonan Pencatatan
 Nikah Beda Agama Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan
 No. 1 Tahun 1974. *Iancurup*, 1(916), 21–40. [Https://Doi.Org/2963-
 234X](https://doi.org/2963-234X)

Asriati. (2012). Pembaruan Hukum Islam dalam Terapan dan Perundang-
 Undangan di Indonesia. *Jurnal Hukum Diktum*, 10 (1).

<https://media.neliti.com/media/publications/285493-pembaruan-hukum-islam-dalam-terapan-dan-465cb5c6.pdf>.

Burhanuddin, S. F. (2021). *Analysis of Notary Deed as a Basic Reference to Evidence in Civil Law. Legal Brief*, 10 (2).

<https://legal.isha.or.id/index.php/legal/article/download/62/70/248>

Nawawi, N, M. P. & W. M. (2012). *Perkawinan Campuran (Problematika Dan Solusinya)*. Balai Diklat Keagamaan Palembang, 1–15. <https://Sumsel.Kemenag.Go.Id/Files/Sumsel/File/Dokumen/Perkawinancampuranartikel.Pdf>

Eko. (2023, Maret 14). PN Surabaya Terima 16 Permohonan Perkawinan Beda Agama. *Jawapostv*. Diakses pada Maret 15, 2023 dari Artikel Berita: <https://www.jawapos.com/surabaya/14/03/2023/pn-surabaya-terima-16-permohonan-perkawinan-beda-agama/>

ERA. (2020, Desember 7). Rigid Adalah Salah Satu Sifat Konstitusi, Ini Penjelasannya. *Kumparan.Com*. <https://kumparan.com/Berita-Hari-Ini/Rigid-Adalah-Salah-Satu-Sifat-Konstitusi-Ini-Penjelasannya-1umdgrtiqiv/Full>

Gas/C7/Eko. (2023, Maret 14). Pn Surabaya Terima 16 Permohonan Perkawinan Beda Agama. *Jawapostv*. <https://www.jawapos.com/surabaya/14/03/2023/pn-surabaya-terima-16-permohonan-perkawinan-beda-agama/>

- Ichsan, E. (2014, September 16). Nikah Beda Agama, Buddha: Harus Seagama, Tak Bisa Ditawar (Ii). *Republika News*.
<https://News.Republika.Co.Id/Berita/Nbzau8/Nikah-Beda-Agama-Buddha-Harus-Seagama-Tak-Bisa-Ditawar-Ii>
- Kaharuddin, M. Pd. I & Syafruddin, M. P. (2020). Pernikahan Beda Agama Dan Dampak Terhadap Pendidikan Agama Anak. *Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 4(1).
<https://media.neliti.com/media/publications/335336-pernikahan-beda-agama-dan-dampak-terhada-a6be4e9c.pdf>
- Mardalena, H. (2020). Perbandingan Tugas Mediator Pada Pengadilan Agama Indonesia Dengan Mahkamah Syariah Malaysia. *Jurnal Hukum Acara Perdata Adhaper*, 6(2). <https://doi.org/25799509>
- Misbahul Munir & Ahmad Dahlan. (2020). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Beda Agama Dalam Kitab Tafsir Al-Ahkam Karya Syaikh Aly Al-Shabuny. *Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam*, 2(2).
<https://ejournal.stisabuzairi.ac.id/index.php/asa/article/view/8#:~:text=Tafsir%20ayat%20dalam%20kitab%20Tafsir,hadits%20Nabi%2C%20dan%20Qaidah%20fiqh.>
- Muhammad Ashsubli. (2015). Undang-Undang Perkawinan Dalam Pluralitas Hukum Agama (Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama). *Jurnal Cita Hukum*, 3(2).
<https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum/article/view/2319>

- Nasrullah. (2020). Analisis Hukum Penerapan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Ri Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Pasal 35 Huruf A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pada Kasus Perkawinan Beda Agama. *Iainambon*, 16(1), 1–12.
<https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/thk/article/download/1121/pdf>
- POP/FRA. (2023, August 28). PN JAKUT Sahkan Pernikahan Beda Agama Izinkan Dicatat Ke Dukcapil
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230828192840-12-991544/pn-jakut-sahkan-pernikahan-beda-agama-izinkan-dicatat-ke-dukcapil>. *CNN*.
- Rizky Perdana Kiay. (2018). Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia. *Jurnal Lex Privatum*, Vi(21), 1–9.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/issue/view/210>.
- Rzr/Arh. (2022, Maret 8). Viral Nikah Beda Agama Di Semarang, Wanita Islam Dengan Pria Katolik. *Cnnindonesia.Com*.
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220308093007-20-768117/viral-nikah-beda-agama-di-semarang-wanita-islam-dengan-pria-katolik>
- Samara, K., & Atabik, A. (2015). Dari Konseling Perkawinan Menuju Keluarga “SAMARA.” *Iain Kudus*, 6(1), 107–124.

<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Konseling/Article/Download/1042/954>

Santoso. (2016). Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat. *Jurnal Yudisia*, 7(2), 412–434.

<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/2162>

Sri Rahayu, S.H., M. . (2014). Implikasi Asas Legalitas Terhadap Penegakan Hukum Dan Keadilan. *Jurnal Inovatif*, Vii(3).

<https://media.neliti.com/media/publications/43225-id-implikasi-asas-legalitas-terhadap-penegakan-hukum-dan-keadilan.pdf>

Wildan Pratama. (2022). Pn Surabaya Terima Permohonan Nikah Beda Agama Untuk Ketiga Kalinya. *Suarasurabaya*.

<https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2022/pn-surabaya-terima-permohonan-nikah-beda-agama-untuk-ketiga-kalinya/>

Zakiah Alatas, S. (2007). Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kabupaten Semara